

PENGUATAN PENDIDIKAN POLITIK MELALUI *CIVIC INTELEGENCE CIVIC PARTICIPATION* DAN *CIVIC RESPONSIBILITY*

Mais Nurdin

Prodi PPKn, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo

Email: maisnurdinkadir@gmail.com

Abstract:

This research aims to examine in-depth the strengthening of political education through civic intelligence, civic participation, and civic responsibility. The method used in this study is qualitative with a library research approach, reviewing and analyzing various scientific sources, including journals, books, and previous research relevant to the themes of civic education and political education. The research findings demonstrate that strengthening political education, which integrates Civic Intelligence, Civic Participation, and Civic Responsibility, is crucial in producing citizens who are not only politically intelligent but also active, responsible, and committed to positive social change. Civic Intelligence helps citizens think critically and understand social and political issues in depth, while Civic Participation trains citizens to play an active role in democratic life, whether through elections, public discussions, or advocacy. Civic Responsibility emphasizes the importance of awareness of social responsibility, where citizens act ethically and responsibly in making decisions that affect society. Therefore, civic education plays a crucial role in strengthening the political education of citizens.

Keywords: Political Education, Civic Intelligence, Civic Participation, Civic Responsibility

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penguatan pendidikan politik melalui kecerdasan kewarganegaraan (civic intelligence), partisipasi kewarganegaraan (civic participation), dan tanggung jawab kewarganegaraan (civic responsibility). Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber ilmiah, baik berupa jurnal, buku, maupun penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan politik. Hasil penelitian penguatan pendidikan politik yang mengintegrasikan Civic Intelligence, Civic Participation, dan Civic Responsibility sangat penting dalam menghasilkan warga negara yang tidak hanya cerdas secara politik, tetapi juga aktif, bertanggung jawab, dan berkomitmen terhadap perubahan sosial yang positif. Civic Intelligence membantu warga negara untuk berpikir kritis dan memahami isu-isu sosial dan politik secara mendalam, sementara Civic Participation melatih warga negara untuk berperan aktif dalam kehidupan demokrasi, baik melalui pemilu, diskusi publik, atau advokasi. Civic Responsibility menekankan pentingnya kesadaran terhadap tanggung jawab sosial, di mana warga negara bertindak secara etis dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi masyarakat. Dengan demikian pendidikan kewarganegaraan memiliki peran sangat penting dalam penguatan pendidikan politik terhadap warga negara.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Civic Intelligence, Civic Participation, Civic Responsibility

PENDAHULUAN

Pendidikan politik memiliki peran yang sangat vital dalam proses pembangunan demokrasi suatu negara. Di Indonesia, pendidikan politik menjadi aspek penting

dalam menciptakan warga negara yang tidak hanya mengetahui hak dan kewajibannya, tetapi juga memahami peran mereka dalam proses politik yang lebih luas. Pendidikan politik bertujuan untuk membekali masyarakat

dengan pemahaman yang mendalam mengenai sistem politik, ideologi, serta mekanisme pemerintahan yang ada, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam proses politik, seperti pemilihan umum, pemilu, pengambilan keputusan politik, hingga partisipasi dalam kebijakan publik.

(Affandi, 2012) pendidikan politik merupakan suatu proses yang sangat erat kaitannya dengan internalisasi nilai dalam kehidupan individu. Proses ini terjadi ketika seseorang mempelajari dan menyerap nilai-nilai serta norma yang ada dalam suatu budaya, sehingga ia tidak hanya mengenal budaya tersebut secara kognitif, tetapi juga menjadikannya sebagai bagian dari diri mereka. Dalam konteks pendidikan politik, internalisasi nilai ini berperan penting karena melibatkan pembentukan pemahaman dan keyakinan yang mendalam terhadap prinsip-prinsip politik yang ada dalam masyarakat. Pendidikan politik, dengan demikian, bukan hanya berfokus pada pengajaran tentang teori politik atau sistem pemerintahan, tetapi juga pada bagaimana nilai-nilai politik tersebut diinternalisasikan dalam diri individu hingga menjadi bagian dari konsep diri mereka. Nilai-nilai tersebut akan membentuk cara pandang seseorang terhadap politik dan pemerintahan, serta mempengaruhi pola perilaku mereka dalam kehidupan sosial dan politik.

Sebagai proses pembudayaan, pendidikan politik juga berperan dalam membentuk nilai-nilai dasar yang fundamental, yang membentuk keyakinan dan sikap politik individu. Melalui pendidikan politik, individu

tidak hanya diajarkan untuk memahami konsep-konsep politik yang lebih abstrak, tetapi juga untuk mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pola perilaku yang dibentuk melalui pendidikan politik mencakup cara seseorang berinteraksi dengan sesama dalam konteks sosial-politik, serta bagaimana mereka menjalankan peran mereka sebagai warga negara yang aktif. Oleh karena itu, pendidikan politik memiliki peran yang sangat besar dalam memperkuat fondasi demokrasi dan membangun masyarakat yang lebih partisipatif, sadar, dan bertanggung jawab dalam menjalankan kehidupan politiknya.

Oleh sebab itu pendidikan politik adalah suatu proses pendidikan yang terstruktur dan bertujuan dengan fokus pada pengarahan individu untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Menurut (Cholisin, 2013) pendidikan politik bukan hanya memberikan pemahaman tentang teori atau sistem politik, tetapi juga bertujuan untuk memengaruhi individu agar lebih aktif dalam perjuangan politik. Dalam hal ini, pendidikan politik berfungsi sebagai upaya sengaja untuk mendorong individu agar tidak hanya memahami konsep politik secara kognitif, tetapi juga merasa bertanggung jawab secara moral terhadap tindakan dan pilihan politik mereka. Setiap individu diharapkan untuk memikul tanggung jawab moral yang tinggi, yang mencakup integritas, kejujuran, dan rasa adil dalam setiap langkah mereka di dunia politik. Dengan demikian, pendidikan politik bertujuan untuk menciptakan warga negara yang aktif, terlibat, dan bertanggung jawab dalam mengelola proses politik yang ada.

Selain itu, (Alfian, 1986) menekankan bahwa pendidikan politik adalah usaha sadar yang dilakukan untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat. Ini berarti bahwa pendidikan politik tidak hanya mengajarkan pengetahuan politik semata, tetapi juga membentuk cara berpikir, sikap, dan perilaku masyarakat agar mereka dapat memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal yang hendak dibangun. Dalam pandangan ini, pendidikan politik bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana sistem politik bekerja, serta bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dan terlibat dalam pembangunan sistem politik yang ideal dan demokratis. Dengan demikian, pendidikan politik berperan sangat penting dalam membangun budaya politik yang lebih inklusif, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Di Indonesia, di mana demokrasi masih terus berkembang, penguatan pendidikan politik sangat diperlukan di berbagai tingkat pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, seluruh lapisan masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Pendidikan politik yang kuat dapat menghasilkan generasi yang lebih peduli terhadap kondisi sosial-politik negara, serta lebih siap menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas demokrasi. Dalam konteks ini, pendidikan politik bukan hanya soal mengajarkan sistem politik, tetapi juga tentang membentuk karakter dan sikap warga negara yang bertanggung jawab dan

berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan keberagaman. Dengan demikian, penguatan pendidikan politik yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat akan mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Dalam memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan baik dan efektif, pendidikan politik harus lebih dari sekadar mengajarkan teori-teori dasar tentang politik atau sistem pemerintahan. Pendidikan politik yang berkualitas harus mampu mengarahkan warga negara untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial dan politik mereka. Oleh karena itu, pendidikan politik harus mengintegrasikan berbagai elemen yang mendukung keterlibatan aktif warga negara, agar mereka tidak hanya mengetahui hak-hak mereka, tetapi juga menjalankan kewajiban mereka sebagai bagian dari masyarakat demokratis. Dalam hal ini, tiga aspek penting dalam pendidikan politik yakni, civic intelligence (kecerdasan kewarganegaraan), civic participation (partisipasi kewarganegaraan), dan civic responsibility (tanggung jawab kewarganegaraan) perlu dikuatkan dalam pendidikan politik.

Kecerdasan Kewarganegaraan merupakan pilar utama dalam membangun warganegara yang aktif, yang berperan penting dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Kecerdasan ini tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga melibatkan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk berkontribusi secara positif terhadap

masyarakat dan negara. Sebagai warga negara yang cerdas, seseorang harus memahami hak-haknya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, kebebasan berbicara, dan hak untuk memilih, serta kewajiban yang harus dipenuhi, seperti membayar pajak dan menaati hukum. Selain itu, kecerdasan kewarganegaraan juga mencakup kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, baik melalui pemilihan umum atau diskusi publik, serta berkontribusi pada pembuatan kebijakan yang memengaruhi kehidupan bersama (Kamalia, 2025).

Menurut (Aini, 2018) kecerdasan kewarganegaraan mencakup kecerdasan intelektual, emosional, dan moral, yang semuanya berperan penting dalam membentuk individu yang bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Salah satu cara untuk meningkatkan kecerdasan kewarganegaraan adalah melalui budaya membaca, yang tidak hanya dapat memperluas wawasan intelektual, tetapi juga membantu membentuk karakter dan budi pekerti yang baik. Dengan membaca, individu dapat memahami nilai-nilai sosial, etika, serta prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga mendorong mereka untuk menjadi warga negara yang lebih cerdas, empatik, dan terlibat dalam proses sosial yang positif.

Proses pendidikan politik yang fokus pada kecerdasan kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan pemahaman mendalam mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara dalam masyarakat. Ini bukan hanya tentang mengingat fakta atau aturan hukum, tetapi lebih pada membangun

kesadaran dan pengalaman praktis mengenai bagaimana sistem politik memengaruhi kehidupan sehari-hari dan bagaimana setiap warga negara dapat terlibat dalam membuat keputusan yang berdampak luas. Misalnya, dalam konteks partisipasi politik, pendidikan politik dengan kecerdasan kewarganegaraan akan mengajarkan siswa atau masyarakat tentang bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam pemilu, mengambil bagian dalam forum diskusi publik, atau bahkan bergabung dalam gerakan sosial untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan orang lain.

Menurut (Atlee & Zubizarreta, 2003) civic intelligence adalah suatu kerangka yang menggambarkan bagaimana individu dan kelompok dalam masyarakat dapat berinteraksi untuk menyelesaikan masalah sosial dengan cara yang kolaboratif dan efektif. Dalam konsep ini, terdapat lima aspek utama yang saling berkaitan, yang kesemuanya bertujuan untuk mendorong perubahan sosial yang positif dan berkelanjutan. Aspek pertama adalah pemahaman terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Ini lebih dari sekedar mengetahui masalah yang ada, tetapi mencakup pemahaman mendalam terhadap akar penyebab masalah tersebut. Pemahaman ini melibatkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat serta pengakuan terhadap perspektif yang berbeda dalam menyelesaikan masalah sosial.

Selain civic intelligence peran civic participation sangat penting dalam pendidikan politik karena keterlibatan aktif setiap individu dalam kehidupan politik dan sosial mereka, terutama dalam sistem demokrasi. Partisipasi

kewarganegaraan mengacu pada keterlibatan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan politik, seperti pemilu, pengambilan keputusan publik, serta diskusi atau forum sosial yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pendidikan politik yang menekankan partisipasi kewarganegaraan bertujuan untuk mengajarkan dan mendorong individu untuk menyadari hak dan kewajiban mereka dalam berpartisipasi aktif dalam proses politik, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan demokrasi itu sendiri.

(Rachman & Fitra, 2020) Partisipasi kewarganegaraan dapat dipahami sebagai derajat kekuatan warga negara dalam berperan serta dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini mengacu pada tingkat keterlibatan dan kontribusi yang diberikan oleh warga negara dalam proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, serta pelaksanaan aturan di dalam negara. Kekuatan ini tidak hanya mencakup kemampuan untuk menyuarakan pendapat, tetapi juga kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan yang mengatur kehidupan bersama. (Sopianingsih, Insani, Muthaqqin, Baeihaqi, & Masitoh, 2023) partisipasi kewarganegaraan yang efektif dapat diwujudkan melalui gerakan nyata dalam bidang pendidikan, salah satunya dengan mendorong inovasi dalam pembelajaran. Melalui inovasi ini, proses belajar mengajar tidak hanya menjadi lebih menarik, tetapi juga lebih relevan dengan perkembangan zaman, sehingga dapat menarik minat siswa untuk lebih aktif dan bersemangat dalam mengikuti

pelajaran. Salah satu kontribusi penting warga negara dalam konteks ini adalah meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi generasi bangsa. Dengan memperkuat kedua keterampilan ini, warga negara berperan dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan, baik di dunia kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Mensinyalir hal tersebut, pentingnya partisipasi kewarganegaraan dalam demokrasi tidak bisa dipandang sebelah mata. Demokrasi yang sehat bergantung pada keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Partisipasi ini bukan hanya terbatas pada kegiatan memilih dalam pemilu, tetapi juga mencakup peran aktif dalam pengambilan keputusan, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, serta advokasi untuk perubahan sosial. Melalui pendidikan politik, individu diajarkan untuk memahami bahwa partisipasi mereka dalam proses politik memiliki dampak langsung terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat. Partisipasi ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengartikulasikan aspirasi mereka dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.

Pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan politik memiliki peran yang saling terkait dalam membentuk warga negara yang aktif, kritis, cerdas, dan demokratis. Menurut (Humaeroh & Dewi, 2021) pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membangun keterampilan partisipatif yang menjadikan

warga negara Indonesia lebih aktif dalam berpartisipasi dalam proses sosial dan politik, serta untuk membangun kebudayaan demokrasi yang berkeadaban. Hal ini sejalan dengan temuan (Mulia, 2024) mengemukakan semua warga negara memiliki tanggung jawab untuk menerima pendidikan politik, yang tidak hanya memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban, tetapi juga mendorong individu untuk berperan aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Kedua temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dan politik memiliki tujuan yang sama yaitu membentuk warga negara yang tidak hanya memahami hak-hak mereka, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan proses demokrasi, yang pada akhirnya mendukung terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadaban.

Dengan demikian warga negara yang baik memiliki kesadaran terhadap kewajiban dalam menjaga dan memperkuat sistem politik, sosial, dan ekonomi yang ada di negara. Tanggung jawab kewarganegaraan mencakup berbagai dimensi, seperti mematuhi hukum, menjaga ketertiban umum, berpartisipasi dalam kegiatan politik, serta berkontribusi pada kebaikan bersama dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan politik, tanggung jawab kewarganegaraan bukan hanya sekadar memahami hak-hak yang dimiliki, tetapi juga mencakup pemahaman yang mendalam mengenai kewajiban moral dan etika politik yang harus dijalankan oleh setiap warga negara. Tanggung jawab kewarganegaraan dalam pendidikan politik juga mengajarkan bahwa

setiap warga negara memiliki peran dalam memastikan bahwa negara berfungsi dengan baik dan sistem politik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Pendidikan politik bertujuan untuk membentuk karakter dan sikap warga negara agar mereka tidak hanya pasif menerima keputusan politik, tetapi aktif dalam berkontribusi untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik.

Dari argumentasi di atas, jelas bahwa pendidikan kewarganegaraan memainkan peran yang sangat penting dalam pendidikan politik, karena keduanya saling berkaitan erat dalam membentuk warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran sosial-politik yang tinggi. Pendidikan kewarganegaraan memberikan dasar yang kuat untuk memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara, serta mengajarkan pentingnya keterlibatan dalam proses-proses demokrasi. Oleh karena itu, kajian ini menekankan tiga elemen penting dalam pendidikan kewarganegaraan melalui Civic Intelligence, Civic Participation, dan Civic Responsibility sebagai sarana untuk memperkuat pendidikan politik dalam masyarakat. Civic Intelligence memberikan dasar pemahaman yang mendalam tentang dinamika politik dan sosial, serta meningkatkan kemampuan individu untuk berpikir kritis dan menganalisis permasalahan sosial secara objektif. Civic Participation mendorong individu untuk tidak hanya menjadi penonton dalam sistem politik, tetapi untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan politik, seperti pemilu, diskusi publik, dan gerakan sosial. Civic Responsibility mengajarkan pentingnya

tanggung jawab moral dan etika dalam kehidupan politik.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif terkait penguatan pendidikan politik melalui Civic Intelligence, Civic Participation, dan Civic Responsibility dengan pendekatan library research atau penelitian pustaka yang mengandalkan sumber informasi yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya. Penelitian pustaka ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis informasi yang relevan guna menjawab masalah penelitian tanpa perlu melakukan observasi lapangan atau eksperimen. Proses pertama dalam penelitian pustaka adalah identifikasi masalah penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan pencarian sumber-sumber yang relevan melalui perpustakaan fisik, perpustakaan digital, atau database jurnal terpercaya. Setelah sumber-sumber tersebut terkumpul, peneliti perlu melakukan seleksi dan evaluasi untuk memastikan kredibilitas dan relevansi informasi yang digunakan. Kemudian, data yang ada dianalisis untuk mengidentifikasi tema, konsep, dan perbandingan teori yang ditemukan, yang akhirnya disusun dalam bentuk laporan atau artikel ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Kecerdasan Kewarganegaraan (Civic Intelligence) Dalam Pendidikan Politik

Kecerdasan Kewarganegaraan (Civic intelligence) dalam pendidikan politik mengacu

pada kemampuan kolektif masyarakat untuk berpikir, berdiskusi, dan mengambil keputusan yang bijaksana terkait isu-isu sosial, politik, dan ekonomi guna menciptakan perubahan positif bagi komunitas dan negara. Dalam konteks pendidikan politik, civic intelligence atau kecerdasan kewarganegaraan memainkan peran yang sangat penting dalam membekali individu dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dan konstruktif dalam kehidupan politik. Pendidikan politik yang mengintegrasikan konsep civic intelligence tidak hanya mengajarkan teori-teori politik, tetapi juga memfasilitasi pengembangan keterampilan berpikir kritis, komunikasi efektif, dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah sosial. Dengan demikian, civic intelligence memungkinkan warga negara untuk tidak hanya memahami hak dan kewajiban mereka, tetapi juga untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan politik yang berorientasi pada kebaikan bersama, serta memengaruhi perubahan sosial dan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Menurut (Schuler, 2008) Civic Intelligence (kecerdasan kewarganegaraan) merupakan konsep yang menggambarkan kemampuan individu atau kelompok untuk memahami, menganalisis, dan merespons isu-isu sosial, politik, dan ekonomi secara cerdas, kritis, dan kreatif demi kepentingan bersama dalam masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya pengembangan kapasitas warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis. Berbeda dengan kecerdasan

individu, civic intelligence menekankan kolaborasi sosial dan kolektif, di mana proses berpikir bersama menjadi kunci dalam mengatasi masalah sosial dan politik yang kompleks. Dalam konteks ini, civic intelligence bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga melibatkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kerja sama, dan pengambilan keputusan bersama yang konstruktif. Hal ini membuat teori ini sangat relevan dalam pendidikan politik, di mana warga negara didorong untuk tidak hanya memahami isu-isu politik secara pribadi, tetapi juga bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan menguntungkan banyak pihak.

Kemampuan warga negara untuk tidak hanya memahami sistem politik dan pemerintahan, tetapi juga untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengkritisi kebijakan serta memengaruhi proses pengambilan keputusan, adalah inti dari civic intelligence atau kecerdasan kewarganegaraan. Konsep ini mencakup berbagai dimensi penting, seperti kemampuan untuk bekerja sama dalam kelompok, mengelola konflik, dan beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik. Civic intelligence menekankan pentingnya kolaborasi sosial dan pengambilan keputusan bersama yang efektif, yang lebih dari sekadar pengetahuan teknis tentang struktur politik. Warga negara yang memiliki kecerdasan kewarganegaraan yang tinggi dapat memahami isu-isu sosial yang kompleks dan ikut serta dalam membangun dialog yang produktif antar individu dan kelompok. Hal ini melibatkan keterampilan sosial dan emosional, seperti

empati, keterbukaan, dan kemampuan untuk mendengarkan dan merespons secara konstruktif terhadap pandangan yang berbeda. Dengan demikian, civic intelligence tidak hanya memperkaya pengetahuan politik, tetapi juga membekali warga negara dengan kemampuan untuk menciptakan ruang diskusi yang inklusif dan solusi bersama yang dapat menyelesaikan tantangan sosial dan politik yang dihadapi masyarakat.

Dalam konteks pendidikan, civic intelligence bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran politik yang mendalam pada individu sejak dini. Pendidikan politik yang baik tidak hanya mengajarkan fakta-fakta atau teori-teori tentang negara, tetapi juga mengembangkan pemahaman tentang tanggung jawab sosial dan pentingnya partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa civic intelligence lebih dari sekadar pengetahuan teknis, tetapi juga mencakup pengembangan sikap dan keterampilan yang memungkinkan individu untuk berperan serta dalam kehidupan demokratis. Konsep ini memberikan perhatian pada pengembangan kemampuan berpikir kritis yang memungkinkan warga negara untuk menganalisis dan mengevaluasi isu-isu sosial secara mendalam, serta bertindak secara etis dalam konteks sosial dan politik.

Pentingnya civic intelligence dalam pendidikan politik tercermin dalam kemampuannya untuk membangun demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Demokrasi tidak hanya membutuhkan pemilih yang tahu hak-hak mereka, tetapi juga individu yang mampu berpikir kritis, memahami kompleksitas isu-isu sosial, dan berkontribusi pada pencarian solusi

yang lebih baik. Pendidikan politik yang mengintegrasikan konsep civic intelligence akan menumbuhkan karakter-karakter demokratis yang tidak hanya tahu apa yang harus dilakukan, tetapi juga memahami mengapa mereka melakukannya dan bagaimana tindakan mereka dapat mempengaruhi perubahan sosial yang lebih besar. Dengan demikian, civic intelligence tidak hanya memperkaya pengetahuan politik, tetapi juga memperkuat peran aktif individu dalam masyarakat demokratis yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan zaman.

(Dotutinggi, Rampi, Silingade, & Panigoro, 2023) dalam temuannya pengetahuan kewarganegaraan memiliki peran krusial dalam meningkatkan pemahaman politik warga negara. Pengetahuan ini meliputi peningkatan pemahaman individu tentang hak, kewajiban, serta peran mereka dalam sistem politik negara. Dengan pengetahuan kewarganegaraan yang lebih kuat, warga negara akan lebih mampu mengerti isu-isu politik yang berkembang, memahami kebijakan publik, serta dampaknya terhadap kehidupan mereka. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan partisipasi politik, karena warga negara yang memiliki pemahaman yang baik cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, diskusi publik, maupun keterlibatan dalam keputusan sosial dan politik lainnya. Penguatan pengetahuan kewarganegaraan ini penting untuk menciptakan masyarakat yang kritis, berpendidikan, dan sadar akan tanggung jawab mereka dalam demokrasi.

(Surbekti, 2010) menjelaskan pendidikan politik melalui pendekatan psikologi sosial, dengan konsep identifikasi partai yang merujuk pada keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu, yang dapat memengaruhi perilaku politik mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih tidak hanya didorong oleh pengetahuan rasional, tetapi juga oleh faktor emosional yang memengaruhi keputusan politik mereka. Konsep ini terkait erat dengan civic intelligence, karena kemampuan berpikir kritis dan pemahaman tentang dampak pilihan politik menjadi sangat penting dalam konteks demokrasi. Sementara itu, (Sumantri, 2003) menyatakan bahwa pendidikan politik adalah proses berkelanjutan yang menurunkan nilai-nilai ideologi negara dari satu generasi ke generasi berikutnya untuk membangun watak bangsa. Ini selaras dengan civic intelligence, karena pendidikan politik yang terorganisir tidak hanya mentransfer pengetahuan tetapi juga membentuk individu yang mampu berkontribusi secara aktif dalam kehidupan politik, serta berpikir kritis untuk mencari solusi yang lebih baik bagi masyarakat.

Warga negara yang cerdas secara kewarganegaraan akan lebih mudah berkolaborasi, berdiskusi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, sekaligus menghormati hak dan pendapat orang lain. Civic intelligence memungkinkan warga negara untuk memahami dan menghargai perbedaan, serta memfasilitasi dialog konstruktif yang memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan politik, mengembangkan civic intelligence berarti

mempersiapkan warga negara untuk berperan aktif dalam kehidupan demokrasi, tidak hanya dengan cara memilih atau mengikuti kebijakan, tetapi juga dengan berkontribusi dalam proses pembuatan keputusan yang mengarah pada solusi masalah sosial yang relevan. Hal ini juga mencakup pentingnya mempertahankan integritas sistem politik, di mana warga negara yang memiliki kecerdasan kewarganegaraan yang baik akan menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mengawasi jalannya pemerintahan, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama.

Konteks Partisipasi Kewarganegaraan (Civic Participation) Dalam Pendidikan Politik

Partisipasi Kewarganegaraan (Civic Participation) dalam Pendidikan Politik sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang aktif, terlibat, dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi. Partisipasi kewarganegaraan mengacu pada keterlibatan warga negara dalam berbagai kegiatan sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan mereka dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pendidikan politik, partisipasi ini memainkan peran sentral dalam membekali individu dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk berkontribusi dalam sistem demokrasi. Hal ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban, serta bagaimana cara yang efektif untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi kebijakan publik, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Salah satu aspek utama dalam konteks partisipasi kewarganegaraan adalah pendidikan politik berbasis partisipasi aktif.

Melalui pendidikan ini, warga negara tidak hanya diajarkan tentang teori-teori politik atau struktur pemerintahan, tetapi juga diberikan pemahaman praktis mengenai cara-cara berpartisipasi dalam proses politik, seperti melalui pemilu, diskusi publik, atau berbagai bentuk advokasi. Pembelajaran semacam ini penting karena ia tidak hanya meningkatkan kesadaran politik individu, tetapi juga mengasah keterampilan praktis yang diperlukan untuk terlibat dalam kehidupan politik yang nyata, seperti kemampuan berbicara di depan umum, mengorganisir kampanye, atau melakukan lobbying. Tanpa pengajaran tentang bagaimana berpartisipasi secara efektif, warga negara cenderung menjadi pasif dalam proses politik, hanya sebagai penerima kebijakan daripada pembuatnya.

Esensi dari partisipasi kewarganegaraan membantu warga negara dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara yang cerdas, dan kritis. Pendidikan kewarganegaraan yang efektif mengajarkan siswa untuk berpikir kritis, menganalisis isu-isu sosial dan politik, serta berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Hal ini sejalan dengan temuan (Rejeki & Pagasan, 2019) yang menyatakan bahwa partisipasi kewarganegaraan merupakan tujuan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mewujudkan generasi yang demokratis. Mereka menekankan pentingnya pengembangan kompetensi kewarganegaraan yang mencakup kesadaran sebagai warga negara, komunikasi sosial kultural kewarganegaraan, kemampuan berpartisipasi,

penalaran kewarganegaraan, dan partisipasi kewarganegaraan secara bertanggung jawab.

(Rahayu, Yunitasari, Utaminingsih, Purwaningsih, & Sari, 2024) menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki dampak positif terhadap warga negara. Mereka menemukan bahwa melalui pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif, siswa dapat mengembangkan kesadaran politik dan keterampilan partisipasi yang diperlukan dalam kehidupan demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang relevan dan praktis dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses-proses politik dan sosial. Dengan demikian, partisipasi kewarganegaraan dalam pendidikan politik bukan hanya tentang memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga tentang membekali individu dengan keterampilan praktis dan etika sosial yang diperlukan untuk berperan aktif dalam kehidupan demokrasi. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam membentuk masa depan bersama.

Selain itu, partisipasi kewarganegaraan dalam pendidikan politik juga mencakup aspek etika sosial dan tanggung jawab sosial. Pendidikan politik yang baik mengajarkan warga negara untuk memahami bahwa partisipasi mereka tidak hanya tentang kepentingan pribadi, tetapi juga tentang kepentingan bersama. Hal ini berarti bahwa setiap individu harus mempertimbangkan dampak dari tindakan politik mereka terhadap masyarakat luas. Misalnya, dalam memilih calon

legislatif atau presiden, seorang warga negara yang terdidik secara politik tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pribadi, tetapi juga dampak kebijakan yang akan diambil terhadap kelompok yang kurang beruntung, lingkungan, atau keberlanjutan sosial secara umum. Dengan demikian, partisipasi kewarganegaraan dalam pendidikan politik tidak hanya membekali individu dengan pengetahuan teknis, tetapi juga membentuk karakter moral yang bertanggung jawab dan sadar sosial.

Keterlibatan dalam partisipasi kewarganegaraan juga mengarah pada pengembangan kesadaran kolektif. Masyarakat yang memiliki tingkat partisipasi tinggi akan lebih mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, baik itu dalam kebijakan publik maupun dalam pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, pendidikan politik berfungsi untuk membangun kesadaran kolektif yang mengarah pada tindakan kolektif, di mana warga negara bekerja bersama untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Ini termasuk dalam kegiatan-kegiatan seperti protes damai, petisi, atau bahkan membangun proyek sosial yang bermanfaat bagi komunitas. Pendidikan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip partisipasi kewarganegaraan akan membantu warga negara mengidentifikasi isu-isu sosial yang perlu dipecahkan bersama, serta menginspirasi mereka untuk bekerja bersama dalam mengatasi tantangan tersebut.

Temuan (Azmi, Batubara, & Hati, 2023) menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting

dalam meningkatkan partisipasi warga negara. Melalui pendidikan ini, dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan berpikir kritis, kesadaran sosial, dan motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Pendidikan kewarganegaraan membantu membangun karakter moral yang kuat dan membekali siswa dengan pemahaman tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan sistem politik negara. Hal ini mendorong mereka untuk terlibat dalam kegiatan politik dan sosial yang konstruktif.

Mereduksi uraian tersebut menekankan bahwa partisipasi warga negara sangat penting dalam negara yang menganut system demokrasi, oleh karena itu melalui pendidikan politik dapat menambah pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara. Menurut (Fauziyah, 2024) pendidikan politik memiliki peranan signifikan dalam meningkatkan kesadaran politik dan mendorong keterlibatan warga negara dalam aktivitas politik. Melalui pendidikan ini, warga negara dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika politik yang terjadi di sekitar mereka. (Meyrdania, Amelia, & Ridhoh, 2025) menunjukkan bahwa pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif, seperti mengaitkan materi dengan realitas politik lokal dan menggunakan media digital, dapat meningkatkan literasi politik warga negara. Pendekatan ini memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu politik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, serta memberikan akses yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan politik.

Konteks Tanggung Jawab Kewarganegaraan (Civic Responsibility) Dalam Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan teori-teori politik atau struktur pemerintahan, tetapi juga mengembangkan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara serta pentingnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kebijakan publik. Melalui pendidikan politik, individu diajarkan untuk berpikir kritis, menganalisis isu-isu sosial dan politik, serta bertindak dengan etika sosial yang tinggi. Hal ini memungkinkan warga negara untuk lebih memahami kompleksitas masalah politik dan sosial, serta mendorong mereka untuk berperan aktif dalam proses demokrasi, menjaga integritas sistem politik, dan berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih baik. Dengan demikian, pendidikan politik berfungsi untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara politik, tetapi juga bertanggung jawab dan peduli terhadap kesejahteraan bersama.

Menurut (Sunatra, 2006) pendidikan politik pada hakekatnya merupakan esensi dari pembangunan budaya politik yang berlangsung secara sistematis dan berkesinambungan seiring dengan perjalanan hidup sistem politik. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan politik tidak hanya bersifat sementara atau sesaat, tetapi merupakan proses yang berlangsung dalam jangka panjang dan terus berkembang

seiring dengan perubahan politik yang terjadi di masyarakat. Pendidikan politik berfungsi untuk menumbuhkan budaya politik yang lebih baik, yang melibatkan pembelajaran yang mendalam tentang nilai-nilai demokrasi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan yang adil. Oleh karena itu, pendidikan politik harus disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan sosial-politik yang ada agar dapat terus relevan dan efektif.

Di sisi lain, (Handoyo & Lestari, 2017) mengungkapkan bahwa pendidikan politik bukan hanya sekadar gabungan antara kata "pendidikan" dan "politik", tetapi memiliki makna yang sangat luas. Pendidikan politik, menurut mereka, adalah pendidikan yang diarahkan untuk membina kemampuan individu dalam mengaktualisasikan diri sebagai pribadi yang bebas dan berkembang sebagai warga negara. Ini mencakup pemahaman tentang hak-hak individu, kewajiban sosial, dan peran aktif dalam kehidupan politik. Pendidikan politik ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik, agar setiap individu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana cara berpartisipasi dalam proses politik secara konstruktif. Dengan demikian, pendidikan politik tidak hanya berbicara tentang teori politik, tetapi juga tentang pemberdayaan individu untuk mengembangkan potensi diri dan menjadi bagian dari masyarakat demokratis yang aktif dan bertanggung jawab.

Dalam konteks pendidikan politik tanggung jawab kewarganegaraan merupakan elemen penting dalam membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung

jawab. (Sahi, 2024) pendidikan kewarganegaraan tidak hanya sebagai instrument dalam pendidikan politik akan sebagai elemen penting dalam menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia. Menurut Sapriya (2001) dalam (Magdalena, Haq, & Ramdhan, 2020) tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah membekali warga negara dengan pengetahuan dan keterampilan untuk berpartisipasi secara nalar dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik, sesuai dengan nilai-nilai demokrasi konstitusional Indonesia. Pendidikan ini tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter moral yang mendukung partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

(Mulyani, 2022) menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi politik warga negara. Melalui pendidikan ini, warga negara diajarkan untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta pentingnya keterlibatan dalam proses politik untuk mewujudkan demokrasi yang sehat. Pendidikan kewarganegaraan yang efektif dapat membentuk karakter moral yang kuat dan membekali siswa dengan pemahaman tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan sistem politik negara, yang mendorong mereka untuk terlibat dalam kegiatan politik dan sosial yang konstruktif. Selain itu, (Julianto, Jaminie, & Prakoso, 2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pendidikan politik dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum. Pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik atau lembaga

pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat, sehingga mereka lebih aktif dalam berpartisipasi dalam proses politik.

Dengan demikian bahwa tanggung jawab kewarganegaraan (civic responsibility) pendidikan politik merujuk pada pemahaman dan penerapan kewajiban warga negara untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat. Tanggung jawab kewarganegaraan ini tidak hanya mencakup hak untuk memilih dalam pemilu atau berpartisipasi dalam pemungutan suara, tetapi juga melibatkan keterlibatan dalam berbagai aspek kehidupan yang berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Dalam pendidikan politik, pengembangan tanggung jawab kewarganegaraan sangat penting karena membantu warga negara memahami bahwa mereka bukan hanya penerima kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh negara, tetapi juga aktor yang berperan dalam pengambilan keputusan tersebut. Pendidikan politik yang efektif memberikan kesadaran kepada warga negara tentang peran mereka dalam mengelola demokrasi dan bagaimana keputusan yang diambil dapat memengaruhi masyarakat secara luas.

Tanggung jawab kewarganegaraan dalam pendidikan politik juga berkaitan erat dengan pembentukan karakter moral yang bertanggung jawab. Warga negara yang memahami tanggung jawab sosial mereka tidak hanya akan bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi, tetapi akan mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain dan masyarakat

secara keseluruhan. Ini termasuk pemahaman tentang pentingnya menghormati hak orang lain, berpartisipasi dalam pemecahan masalah sosial, dan bekerja sama dalam memajukan tujuan bersama. Pendidikan politik yang menekankan pada tanggung jawab kewarganegaraan mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk melindungi dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Hal ini mencakup penerimaan atas peran masing-masing dalam menjaga integritas sistem politik serta berkontribusi terhadap perubahan sosial yang lebih baik.

Selain itu, tanggung jawab kewarganegaraan dalam pendidikan politik mencakup pentingnya etika dalam berpartisipasi dalam kehidupan politik. Pendidikan politik yang baik tidak hanya mengajarkan warga negara untuk memahami aturan dan prosedur politik, tetapi juga untuk bertindak dengan integritas dan etika. Dalam masyarakat yang demokratis, perilaku politik yang etis melibatkan keputusan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip moral, keadilan, dan kepentingan bersama, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Warga negara yang memiliki tanggung jawab kewarganegaraan yang baik akan selalu berusaha memastikan bahwa tindakan politik mereka tidak merugikan orang lain atau menambah ketidakadilan. Oleh karena itu, pendidikan politik yang efektif harus memperkenalkan dan mengembangkan pemahaman tentang bagaimana menjadi warga negara yang bertanggung jawab secara sosial, serta memberikan alat untuk membuat

keputusan yang baik yang bermanfaat bagi semua pihak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas tentang penguatan pendidikan politik melalui civic intelligence, civic participation, dan civic responsibility merupakan langkah strategis dalam membentuk warga negara yang tidak hanya memahami sistem politik, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga dan memperkuat sistem demokrasi. Kecerdasan kewarganegaraan (civic intelligence) melibatkan pengembangan kemampuan individu dan kelompok untuk berpikir kritis, menganalisis isu-isu sosial, politik, dan ekonomi, serta meresponsnya secara cerdas, kreatif, dan konstruktif. Pendidikan politik yang mengintegrasikan konsep ini memungkinkan warga negara untuk tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka, tetapi juga untuk memahami dinamika politik yang lebih kompleks, serta bagaimana cara berpartisipasi secara efektif dalam pengambilan keputusan politik.

Partisipasi kewarganegaraan (civic participation) menjadi elemen kunci dalam mengaktualisasikan Civic Intelligence. Partisipasi aktif ini melibatkan keterlibatan warga negara dalam berbagai kegiatan sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi kebijakan publik dan kehidupan warga negara. Melalui civic participation dalam pendidikan politik warga negara tidak hanya dilatih untuk memahami teori-teori politik, tetapi juga dilatih untuk berkontribusi secara langsung dalam proses-proses politik yang nyata, seperti

pemilu, diskusi publik, dan kegiatan advokasi. Pendekatan semacam ini memungkinkan individu untuk mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan dalam kehidupan politik sehari-hari, seperti berbicara di depan umum, merancang kampanye, atau mengorganisir gerakan sosial.

Selain itu, tanggung jawab kewarganegaraan (civic responsibility) memainkan peran penting dalam memperkuat sistem demokrasi. Pendidikan politik yang efektif mengajarkan bahwa partisipasi tidak hanya tentang kepentingan pribadi, tetapi juga tentang kepentingan bersama. Civic responsibility mencakup pemahaman bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan negara. Hal ini tidak hanya melibatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban, tetapi juga tentang bagaimana tindakan politik dan sosial yang diambil dapat memengaruhi kelompok yang kurang beruntung, lingkungan, atau keberlanjutan sosial. Dengan menanamkan nilai-nilai tanggung jawab sosial, pendidikan politik dapat membentuk karakter moral yang bertanggung jawab dan sadar sosial. Oleh karena itu, penguatan civic responsibility melalui pendidikan politik akan menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Affandi, I. (2012). Pendidikan Politik. Bandung: Mutiara Press.
- Aini, D. N. (2018). Pengaruh budaya literasi dalam mengembangkan kecerdasan

- kewarganegaraan. *Biormatika: Jurnal ilmiah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan*, 1-10.
- Alfian. (1986). *Pendidikan Politik: Usaha Sadar Untuk Mengubah Proses Sosialisasi Politik Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Atlee, T., & Zubizarreta, R. (2003). *The Tao of Democracy: Using Co-intelligence to Create a World that Works for All*. Writers' Collective.
- Azmi , L., Batubara, M. S., & Hati, C. (2023). Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik. *Jurnal Media Ilmu*, 173-186.
- Cholisin. (2013). *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Yogyakarta: Ombak.
- Dotutinggi, S., Rampi, R. C., Silingade, Y. S., & Panigoro, Y. (2023). Penguatan Civic Education Dalam Meningkatkan Pengetahuan Substantif Elektoral Politik Pemilih Pemula. *Jurnal Polahi*, 17-22.
- Fauziyah, N. (2024). Peran Pendidikan Politik di Perguruan Tinggi Bagi Mahasiswa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 343-352.
- Handoyo, E., & Lestari, P. (2017). *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Humaeroh, S., & Dewi, D. A. (2021). Peran Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi Dalam Pembentukan Karakter Siswa. *Journal On Education*, 216-222.
- Julianto, M. A., Jaminie, F., & Prakoso, C. T. (2019). Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada Tahun 2015 Di Kelurahan Gunung Tabur Kabupaten Berau. *eJournal Administrasi Negara*, 9073-9085.
- Kamalia, A. N. (2025). Analisis Kecerdasan Kewarganegaraan Terhadap Keterampilan Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Malang. Malang: UMM Institutional Repository.
- Magdalena, I., Haq, A. S., & Ramdhan, F. (2020). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar Negri Bojong 3 Pinang. *Bintang: Jurnal Pendidikan Sains*, 418-430.
- Meyrdania, M., Amelia, D. P., & Ridhoh, M. Y. (2025). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemuda Di Kabupaten Enrekang. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 131-140.
- Mulia, A. M. (2024). Pendidikan Politik dan Manfaat Peranannya Di Masyarakat. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 515-532.
- Mulyani, S. D. (2022). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Siswa. *JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)*, 104-113.
- Rachman, F., & Fitra, I. (2020). Kewarganegaraan Dan Kesehatan: Partisipasi Warga Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal*

- Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 289-303.
- Surbekti, R. (2010). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.
- Rahayu, K., Yunitasari, D., Utaminingsih, E. S., Purwaningsih, I., & Sari, F. I. (2024). Exploring the Impact of Civic Education on Civic Participation among Elementary School Students. *Pedagogia: Jurnal Pendidikan*, 189-195.
- Rejeki, S., & Pagasan, S. A. (2019). Civic Participation Siswa dan Permasalahannya. *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 10-18.
- Sahi, Y. (2024). PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: (Kajian Konseptual, Perbandingan, dan Relevansinya sebagai Sarana Pendidikan Politik). *jurnal Polahi*, 80-94.
- Schuler, D. (2008). *Liberating Voices A Pattern Language for Communication Revolution*. Cambridge: The MIT Press.
- Sopianingsih, P., Insani, N. N., Muthaqin, D. I., Baeihaqi, & Masitoh, I. (2023). Persepsi Mahasiswa Terhadap Program Kampus Mengajar Tahun 2022 Dalam Mengembangkan Keterampilan Partisipasi Kewarganegaraan Mahasiswa. *CivicEdu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 55-61.
- Sumantri, E. (2003). Pendidikan Politik Sebagai Proses Penurunan Nilai-Nilai Dan Norma Dasar Dari Ideologi Suatu Negara. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sunatra. (2006). Pendidikan Politik Sebagai Esensi Pembangunan Budaya Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.